



LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN
BULAN JULI 2016

Pendahuluan

Fungsi pokok Komnas HAM yang dikenal rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan

Pada 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **318 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Wilayah asal pengadu / pelapor

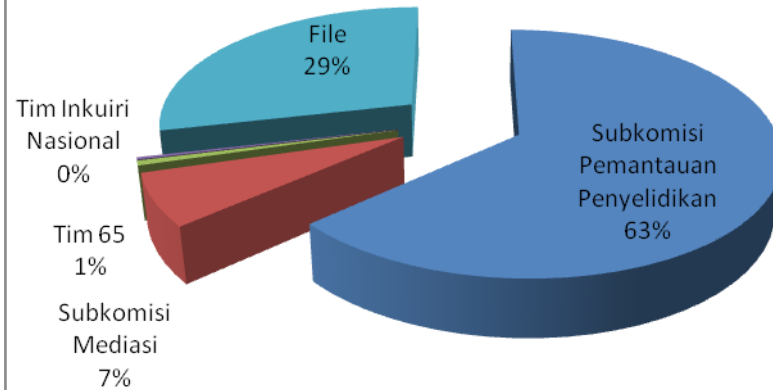
No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah berkas
1	Aceh	4	20	Kalimantan Barat	6
2	Sumatera Utara	21	21	Kalimantan Selatan	3
3	Bengkulu	0	22	Kalimantan Tengah	2

4	Jambi	2	23	Kalimantan Timur	7
5	Riau	6	24	Kalimantan Utara	1
6	Sumatera Barat	23	25	Gorontalo	1
7	Sumatera Selatan	6	26	Sulawesi Selatan	10
8	Lampung	8	27	Sulawesi Tenggara	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	28	Sulawesi Tengah	8
10	Kepulauan Riau	0	29	Sulawesi Utara	7
11	Banten	8	30	Sulawesi Selatan Barat	1
12	Jawa Barat	31	31	Maluku	14
13	DKI Jakarta	53	32	Maluku Utara	2
14	Jawa Tengah	20	33	Papua	6
15	Jawa Timur	33	34	Papua Barat	2
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	6	35	Tanpa Alamat	12
17	Bali	4			
18	Nusa Tenggara Barat	3			
19	Nusa Tenggara Timur	5			

2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi Pemantauan Penyelidikan	202
2	Subkomisi Mediasi	22
3	Tim 65	2
4	Tim Inkuiri Nasional	1
5	File	91
Jumlah		318

Distribusi Berkas Pengaduan



3. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	143
2	Tembusan	171
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan Ke KH	4
Jumlah		318

4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	30
2	Pos	261
3	Fax	3
4	Email	16
5	Audiensi	3
6	Kondisi khusus / inisiatif	2
7	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif	3
Jumlah		318

5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	16
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	4
4	Hak memperoleh keadilan	124
5	Hak atas kebebasan pribadi	12
6	Hak atas rasa aman	30
7	Hak atas kesejahteraan	110
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	3
9	Hak perempuan	1
10	Hak anak	2
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	0
12	Non HAM	16
Jumlah		318

5.1. Klasifikasi pengaduan

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	16
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
3	Hak mengembangkan diri	4
4	Hak memperoleh keadilan	124
5	Hak atas kebebasan pribadi	12
6	Hak atas rasa aman	30
7	Hak atas kesejahteraan	110
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	3
9	Hak perempuan	1
10	Hak anak	2
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	0
12	Non HAM	16
Jumlah		318

5.2. Turunan hak

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	9
Lingkungan hidup	7
Jumlah	16
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
Jumlah	0
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	3
Hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya	1
Jumlah	4
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	97
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	4
Kesewenang-wenangan proses hukum di pengadilan	20
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	3
Jumlah	124
V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	0
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	4
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat	0
Berkumpul, berapat, dan berserikat	6
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	0
Menyampaikan pendapat di muka umum	1
Status kewarganegaraan	0
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	1
Jumlah	12
VI. Hak atas rasa aman	Jumlah berkas
Mencari suaka	1
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	5
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	9

Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	7
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	0
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	4
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	4
Jumlah	30
VII. Hak atas kesejahteraan	Jumlah berkas
Hak untuk mempunyai milik	16
Hak atas kepemilikan tanah	29
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	24
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	9
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	18
Hak atas kesehatan	11
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	3
Jumlah	110
VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	Jumlah berkas
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	0
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil	0
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	3
Jumlah	3
IX. Hak perempuan	Jumlah berkas
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	0
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	0
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	0
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	0
Hak atas kesetaraan dengan suami	1
Jumlah	1
X. Hak anak	Jumlah berkas

Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	0
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	2
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	0
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	0
Jumlah	2
XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	Jumlah berkas
Pemberlakuan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	0
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	0
Jumlah	0
Tidak ada turunan hak	Jumlah berkas
Non Ham	16

6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Individu - Orang seorang	169
2	Individu - Anak	9
3	Individu - Perempuan	4
4	Individu - Buruh migran	4
5	Individu - Pekerja / profesi	8
6	Individu - Suku	0
7	Individu - Ras dan etnis	0
8	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	0
9	Individu - Penyandang disabilitas	0
10	Individu - Teroris	0
11	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	2
12	Individu - Lansia	1
13	Individu - Fakir miskin	0
14	Kelompok - Masyarakat	71
15	Kelompok - Anak-anak	1
16	Kelompok - Perempuan	0
17	Kelompok - Buruh migran	0
18	Kelompok - Pekerja / profesi	15
19	Kelompok - Masyarakat hukum adat	7
20	Kelompok - Ras dan etnis	0

21	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	1
22	Kelompok - Penyandang disabilitas	0
23	Kelompok - LGBT	2
24	Kelompok - Teroris	0
25	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	2
26	Kelompok - Lansia	0
27	Organisasi	4
28	Warga negara asing	2
29	Korporasi	1
30	Lembaga Pendidikan	1
31	Polri	0
32	Lembaga Peradilan	0
32	Tidak ada/ Tanpa Nama	14

7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (Kementerian)	23
2	Pemerintah daerah	30
3	Lembaga negara (Non kementerian)	9
4	Lembaga peradilan	22
5	Kepolisian	100
6	TNI	21
7	Kejaksaan	5
8	Lembaga pasyarakatan dan / atau Rutan	4
9	Korporasi	46
10	BUMN / BUMD	13
11	Lembaga pelayanan kesehatan	3
12	Lembaga pendidikan	6
13	Individu - Orang seorang	4
14	Individu - Pekerja / profesi	2
15	Kelompok - Masyarakat	4
16	Kelompok - Teroris	1
17	Organisasi	3
18	Kelompok - Lansia	1
19	Tanpa Keterangan Pihak yang diadukan	21

8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999¹, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999² dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (C) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan Juni 2016 sebagai salah satu kegiatan reguler dari Subbagian ini dengan perincian sebagai berikut:

Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
38	84	17	139

Surat keluar dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah.

¹Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

²Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi